

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA

by Nanang Bagus S

Submission date: 27-Apr-2021 08:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1571360669

File name: 2226-2778-1-PB.pdf (128.59K)

Word count: 1781

Character count: 11486

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA

Nanang Bagus

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: nanangbagus1997@gmail.com

Abstract. Village- owned enterprises emerged as a new economic force in rural areas. The role of the village government and local communities in maximized to mobilize local economic potential for improving social welfare and villagers. This study aims to determine the strategy of the village government in managing village-owned enterprises and the cooperation between the village government and the private sector in managing village- owned enterprises. This type of research is literacy research and the data used in this study are secondary data collected through library data (newspapers, magazines, and documents), reading and processing previous research materials. The results of this study indicate that village- owned enterprises are a manifestation of the participation of the village community as a whole, so that they do not create business models that are influenced by leadership by certain group at the village level, as well as implementation which is a series of concepts that guide the implementation of a job, leadership and way of acting. And the existence of collaborative governance which a concept in government management as a facilitation process by various institutions both government, community and private parties that aim to solve common problems that cannot be resolved by one agency.

Keywords: village-owned enterprises, governance of village-owned enterprises, collaborative governance

Abstrak. Badan usaha milik desa muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Peran pemerintah desa dan masyarakat lokal dimaksimalkan untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan wargadesa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam mengelolah badan usaha milik desa dan kerjasama pemerintah dan Pihak swasta dalam mengelola badan usaha milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian literasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui data pustaka (koran, majalah, dan dokumen), membaca serta mengolah bahan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa badan usaha milik desa merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di pengaruhi kepemimpinan oleh kelompok tertentu ditingkat desa, juga implementasi yang merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dan adanya Collaborative governance yang merupakan konsep dalam manajemen Pemerintahan sebagai proses fasilitasi oleh berbagai institusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak Swasta yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa di selesaikan oleh satu instansi.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa, Collaborative Governance

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes adalah muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Lahirnya peraturan diatas, memberikan inisiatif BUMDes untuk muncul sebagai perubahan pembangunan desa.

BUMDes hadir sebagai wadah dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Peran pemerintah desa dan masyarakat lokal

dimaksimalkan untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan warga desa.

Menurut Yunanto dkk (2014:7) keunikan BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi asset kepada rakyat secara luas agar mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. (sumber: Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan 2007).

Untuk mencapai langkah tersebut di perlukan kerjasama swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang memiliki definisi. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dibedakan dua jenis yaitu badanusaha Milik swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Arti dari badan usaha Milik swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat dalam negeri. Sedangkan arti dari badan usaha milik swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat asing.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian literasi. Data diperoleh dari data sekunder atau berbagai informasi kepustakaan (koran, majalah, dan dokumen). Pengumpulan data melalui data pustaka, membaca serta mengolah bahan penelitian terdahulu. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Analisis dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan partisipasi Masyarakat Desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di pengaruhi kepemimpinan oleh kelompok tertentu ditingkat Desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota dalam menjalankan tata kelola Badan Usaha Milik Desa.

Dengan adanya modal yang di salurkan oleh Pemerintah Desa untuk dikelola oleh Masyarakat Desa, maka diperlukan partisipasi atau inisiatif Masyarakat Desa dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan Desa yang solid dengan kerjasama Pemerintah Desa dan Masyarakatnya.

Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa melalui partisipasi Masyarakat Desa atas dana yang di salurkan oleh Pemerintah Desa, yang kemudian di kelolah oleh Masyarakatnya dalam mengelola Sumber Daya Alamnya dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelolah Badan Usaha Milik Desa. Karena dengan adanya modal yang disalurkan dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk di kelolah dari bagian Badan Usaha Milik Desa.

Di dalam Peraturan Menteri Desa No. 4/2015 pasal dua dijelaskan mengenai pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang

dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa. Di pasal-pasal selanjutnya, dirumuskan dengan jelas tujuan mendasar dari terbentuknya BUMDes ini adalah untuk Meningkatkan Perekonomian Desa, Mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat bagi Masyarakat, Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes nantinya bahwa Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, Transparansi, Akuntabel, dan Sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal Desa, termasuk ciri Sosial Budaya Masyarakatnya dan Peluang Pasar dari Produk Barang dan Jasa yang dihasilkan oleh Masyarakat setempat

Implementasi Kemitraan BUMDes dan Pihak Ketiga

Implementasi merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Salah satu bagian dari kebijakan adalah implementasi kerjasama dilakukan oleh antar pihak ketiga dan BUMDes yaitu menurut AD/ART yang didasarkan pada peraturan desa nomor 4 Tahun 2016. Adapun implementasi kerjasama ini yang dibuat yaitu berupa suatu dokumen perjanjian yang telah disepakati antar beberapa pihak. Pemerintah Desa disini sebagai Komisaris, sedangkan pelaksanaannya di limpahkan ke BUMDes sebagai program Wisata.

Terkait dengan kemitraan antara BUMDes dan Pihak Swasta sesuai dengan Peraturan Desa yang termuat dalam AD/ART, yaitu Pemerintah Desa mengetahui secara tertulis, saling menguntungkan dan dimuat kedalam Peraturan Desa, serta berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Sumber Daya Manusia setempat.

Sebagian BUMDes memiliki peluang dalam mengembangkan usaha namun harus berskala besar. Biasanya situasi-situasi seperti ini terletak pada Wilayah Perkotaan dan Pertambangan. Namun, penyertaan modal dari Desa terdapat batas maksimal, sehingga BUMDes sulit untuk berkembang dengan modal yang terbatas. Bekerja sama dengan pihak ketiga adalah salah satu alternatif yang mampu mengatasi masalah modal yang terbatas. Pihak ketiga bisa dijadikan suatu investor untuk pengembangan suatu usaha. Cara ini lebih cepat dan efektif karena mampu mendapatkan modal usaha Desa secara langsung.

Akan Tetapi, proses kerjasama dengan Pihak Ketiga seperti ini haruslah melalui prosedur yang jelas dan legal. Kerja sama harus dikuatkan oleh peraturan khusus yang mengikat dan menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban sehingga evaluasi dan kontrol bakal mudah dilakukan. Dengan begitu, kerjasama dengan pihak ketiga benar-benar mampu memberikan manfaat bagi BUMDes.

Collaborative Governance dalam mengelola BUMDes

Collaborative governance adalah konsep dalam manajemen Pemerintahan sebagai proses fasilitasi oleh berbagai institusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak Swasta yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa di selesaikan oleh satu instansi. Menurut Ansell dan Gash (dalam Aryanti Devi dan Sat Lita 2018:812).

Collaborative Governance mampu mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, partisipasi dari Masyarakat dan pihak Swasta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan Minapolitan adalah proses kolaborasi dimulai dari pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan pembentukan kapasitas bersama. Setelah tiga hal itu terbentuk dilanjutkan dengan melaksanakan tindakan kolaborasi yang memberikan dampak sementara.

KESIMPULAN

Dalam pembangunan BUMDes Pemerintah Desa menyalurkan dana Desa untuk dikelola oleh Masyarakat Desa. Pemerintah Desa mengharapkan partisipasi dan inisiatif dari Masyarakat Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa supaya terwujudnya Desa yang solid antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desanya.

Selain itu, adanya *Collaborative Governance* dalam melaksanakan investasi dengan melibatkan Pemerintah, Swasta, Masyarakat, dan *Non-Government Organization* (NGO) dan masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan. Peran dan fungsi Pemerintah sebagai instrumen resmi yang dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam menciptakan *Good Governance*. Pembangunan BUMDes juga dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau badan usaha lainnya.

Dalam kerjasama Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Swasta tidak terlepas dari Pengawasan Pemerintah terhadap sektor Swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Juga merupakan perwujudan partisipasi Masyarakat Desa secara keseluruhan sehingga tidak menciptakan model usaha yang di pengaruhi kepemimpinan oleh kelompok tertentu ditingkat Desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota dalam menjalankan atau mengelolah Badan Usaha Milik Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- French and Bell. 1978. *Organization Development: Behavioral Science Intervention for Organization Improvement*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutoro Eko, dkk. 2015. *Policy Paper: Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh, Dan Berkelanjutan*.
- Wibowo. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yunanto, dkk. 2014. Strategi Pengembangan Bumdes sebagai Pilar Ekonomi Desa ([http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa/policy paper forum pengembangan pembaharuan desa \(FPPD\) 2014](http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembangan-bumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa/policy%20paper%20forum%20pengembangan%20pembaharuan%20desa%20(FPPD)%20(2014).)). Diakses pada tanggal 12 September 2016.

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

3%

2

Indah Permata Sari, Retno A. Ekaputri.
"BUMDES DI KECAMATAN KABAWETAN :
KAJIAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT",
Convergence: The Journal of Economic
Development, 2020

Publication

2%

3

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

2%

4

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

5

Farid Madjodjo, Fadli Dahlan. "Analisis kinerja
Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan
anggaran untuk meningkatkan pengolahan
potensi desa di Desa Akedotilou", Indonesia
Accounting Journal, 2020

Publication

2%

6

Submitted to Sunnyslope High School

Student Paper

2%

7	Ade Onny Siagian. "ANALISIS PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN OESENA DI DESA OESENA KECAMATAN AMARASI KABUPATEN KUPANG", Jurnal Riset Entrepreneurship, 2021 Publication	1 %
8	Neneng Rini Ismawati. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)", Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2020 Publication	1 %
9	Submitted to Korea National Open University Student Paper	1 %
10	Krisna Puji Rahmayanti, Dhian Kusumawardhani, Afiati Indri Wardani. "Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2019 Publication	1 %
11	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1 %
12	Abdurrohman, Anis Fuad Salam, Dwi Fitriarningsih, Indar Riyanto, M, Atep Effiana Taufik. "Manajemen Bisnis Bagi Pengelola BUMDes Kabupaten Pandeglang", KAIBON	1 %

ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2020

Publication

13

Risna Nurul Insani, Indra Indra. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada 20 Negara OKI Tahun 2009-2013", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015

Publication

1 %

14

Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Student Paper

1 %

15

Maria Fransiska Owa Da Santo, Yustinus Pedo. "ASPEK HUKUM PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN PENERAPANNYA PADA BADAN USAHA MILIK DESA", SASI, 2020

Publication

1 %

16

Odilya F. Wetina, Christien C Foenay, Paulina Y Amtiran. "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT BENEFACOR DI KOTA KUPANG", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021

Publication

<1 %

17

A Prabowo, F Arisha, D Triyana, A F Baharudin. "Smart Bumdes: Innovation of E-Collaboration and E-Commerce for Village

<1 %

Economic Development Solution in the New Normal Era (Case Study in Batu City)", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021

Publication

18

Dodi Faedlulloh. "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris", Journal of Governance, 2018

Publication

<1 %

19

Rizka Ismianingtyas, Isna Fitria Agustina. "Kualitas Pelayanan Transportasi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off